

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati berdominasi pepohonan. Menurut fungsinya hutan memiliki fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Hutan yang berfungsi konservasi adalah hutan yang dengan ciri khas tertentu, memiliki fungsi pokok mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. Dan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi hutan sebagai lahan atau area yang memproduksi hasil hutan, hasil hutan berupa kayu maupun non kayu. Di Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas dan memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan keadaan yang ada hutan dapat memanfaatkan sebagai sumberdaya alam yang bisa diperbarui, terutama pada kawasan hutan produksi. Pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menggunakan asas kelestarian lingkungan agar hutan tetap lestari. Masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal berdekatan dengan hutan sejak dulu sudah memanfaatkan keadaan tersebut untuk membuka lahan dan bercocok tanam baik tanaman kayu ataupun non kayu sehingga dapat meningkatkan hasil lahan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat disebut juga Agroforestry.

Agroforestry merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman hutan yang dikombinasikan dengan pertanian atau sering disebut juga wanatani. International Council for research in Agroforestry (ICRAF) mengartikan agroforestry suatu sistem pengelolaan lahan yang berazaskan kelestarian untuk meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, melalui kombinasi produksi (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan atau beruntun pada unit lahan yang sama dan menerapkan cara-cara pengolahan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat. (King dan Chandler (1978) dalam Rauf (2004)). Pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai agroforestry apabila memenuhi dua unsur yaitu aspek agro (pertanian) dan aspek forestry (kehutanan). Sistem ini sudah diterapkan sejak berabad-abad lalu dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi lahan. Pemanfaatan hutan bertujuan agar seluruh masyarakat merasakan dan memperoleh kesejahteraan dengan adanya hutan disekeliling mereka dan akan tetap menjaga kelestariannya. Semakin banyaknya tindakan pengrusakan hutan merupakan indikasi bahwa banyak elemen yang memanfaatkan keberadaan hutan, dan itu mengakibatkan masyarakat desa yang dekat dengan hutan tidak mendapatkan kebebasan dalam mengelola hutan di daerahnya. Partipasi masyarakat desa sangat diperlukan karena masyarakat desa memiliki pengalaman ketrampilan alami yang diwariskan oleh nenek moyang mereka agar mengelola hutan dan tetap menjaga ekosistem dan kelestariannya. Menurut De Foresta dan Michon (1997), agroforestry dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Sistem Agroforestry Sederhana adalah suatu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Jenis-jenis pohon yang ditanam juga sangat beragam, dapat yang bernilai ekonomi tinggi misalnya kelapa, karet, cengkeh, kopi, kakao (coklat), nangka, belinjo, petai, jati dan mahoni atau yang bernilai ekonomi rendah seperti dadap, lamtoro dan kaliandra. Jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan

yaitu padi (gogo), jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, sayur-mayur dan rerumputan atau jenis-jenis tanaman lainnya. Sedangkan Sistem agroforestry Kompleks adalah suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon) baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan.

Agroforestr mempunyai dua manfaat utama yaitu fungsi ekonomi dan fungsi konservasi. Fungsi ekonomi, merupakan cerminan usaha manusia dalam mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang sosial dan ekonomi. Umumnya berupa produk diantaranya hasil hutan, hasil tanaman pangan, peternakan dan sebagainya. Sedangkan fungsi konservasi sebagai pengelolaan hutan dan kawasan konservasi termasuk upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, telah memprogramkan pengembangan hutan kemasyarakatan Kepmen No. 311/ Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, hutan tanaman, dan hutan rakyat dalam bentuk agroforestry. Sebagai paradigma baru dalam pengelolaan hutan, pelaksanaan hutan kemasyarakatan yang dipadukan dengan model agroforestry diharapkan dapat melestarikan hutan alam melalui peningkatan produktivitas lahan hutan di areal masyarakat atau di lahan kritis.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan, pemerintah mengadakan Program Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan masyarakat setempat, program ini bertujuan meningkatkan keseimbangan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Partisipasi masyarakat desa hutan sangat diperlukan untuk pengamanan dan penyelamatan hutan. Partispas masyarakat dalam pengelolaan hutan juga berfungsi sebagai pendidikan dan penyadaran betapa pentingnya menjaga alam sekaligus meningkatkan perekonomian penduduk yang sangat lemah, karena

kurangnya aksesibilitas dalam mengelola sumberdaya hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah antara kelompok perhutani dengan warga desa hutan bekerja sama yang di atur dengan beberapa kesepakatan sesuai aturan yang tertera di akte notaris. Keuntungan dari kerja sama ini akan dibagi sesuai dengan kontribusi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi hasil adalah pembagian peran, hak dan tanggung jawab antara perhutani dan warga sekitar desa hutan serta pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan lahan, dalam pemanfaatan waktu dan pengelolaan kegiatan (Perhutani,2002:2).

Dilansir dari data BPS Kecamatan Jati 2019 memiliki luas lahan pertanian bukan sawah menurut penggunaanya sebagai lahan hutan rakyat memiliki luas 107 ha dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 13.195 ha. Menurut Dinas Kehutanan, Bidang RLPDAS,2013 sebaran luasan hutan rakyat dari kegiatan RHL di Kecamatan Jati dari 2009-2013 selalu mengalami perluasan lahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sebaran Luasan Hutan Rakyat dari Kegiatan RLH menurut Kecamatan Jati, Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (ha)

Tahun	Luas (ha)	Presentase (%)
2009	776.160	18 %
2010	826.160	20 %
2011	846.160	20 %
2012	871.160	21 %
2013	896.160	21%
Jumlah	4.215.8	100 %

Sumber : Dinas Kehutanan, Bidang RLPDAS 2013

Tabel 1.2.

Luasan Penebangan Lahan Hutan Kawasan Bangklean Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Tebangan (Ha)	Presentase (%)
2020	67.8	26 %

2019	53.1	21 %
2018	52.4	20 %
2017	47.2	18 %
2016	39.6	15 %
Jumlah	260.1	100 %

Sumber : KPH Randublatung, Bidang Produksi

Desa bangklean merupakan salah satu wilayah 12 desa di Kecamatan Jati. Desa bangklean mempunyai wilayah 12 dusun memiliki luas wilayah desa 620.05m³ dengan jumlah penduduk 6681 jiwa sebagian besar warganya bermata pencarian petani, potensi pertanian yang menjadi andalan desa bangklean tanaman jagung karena wilayahnya berada ditengah hutan. Desa bangklean merupakan desa terluar diujung bagian selatan Kabupaten Blora. Dilihat dari kondisi fisik wilayah yang dikelilingi hutan maka masyarakat desa Bangklean bekerja sama dengan pihak perhutani untuk mengelola hutan bersama guna mensejahterakan masyarakat dikawasan hutan Bangklean daan melestarikan hutan. Alasan pemilihan di kawasan hutan bangklean dikarenakan kawasan hutan Bangklean memiliki karakteristik yang berbeda antara lain lahannya memiliki kemiringan agak curam dan berbukit serta sistem ini juga memanfaatkan lahan hutan yang kritis karena di kawasan hutan bangklean jika kemarau mengalami pecah tanah atau sering disebut tanah nelo yang cukup dalam dan dengan semakin meluasnya lahan hutan yang dijadikan lahan prtanian yang di kelola masyarakat sekitar hutan akankah dapat meningkatkan nilai perkonomian masyarakat yang terlibat. Sisten Agroforestry kedepan akan menjadi prioritas perhatian perhutani selain di bidang wisata untuk menambah penghasilan dari hasil hutan bukan kayu sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sistem bagi hasil. Sistem Agroforesty juga memberikan ruang untuk masyaraka desa hutan dapat menanam tanaman selain kayu dan masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi antara lain jagung, kacang, ataupun tumbuhan obat-obatan seperti jahe, kunir dan sejenisnya(Perhutani,2019).

Di kawasan hutan bangklean menggunakan sistem agroforestry sederhana dimana sistem pertanannya pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih tanaman musman yang paling dominan adalah ditanami tanaman jagung dan semakin luasnya pembukaan lahan guna memperluas area Agroforestry.dengan semakin luasnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan dampak positif bagi masyarakat hutan. Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian yang dapat membantu masyarakat atau organisasi yang terkait guna melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (AGROFORESTRY) DI KAWASAN HUTAN BANGKLEAN, KECAMATAN JATI KABUPATEN BLORA”

1.2. Perumusan Masalah

Untuk mengetahui arah dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek agroforestry bersama masyarakat di kawasan hutan bangklean?
2. Bagaimana dampak ekonomi sistem Agroforenstry terhadap masyarakat yang terlibat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktek agroforestry bersama masyarakat di kawasan hutan bangklean.
2. Mengetahui dampak ekonomi bagi masyarakat yang bersangkutan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang membahas tentang pemanfaat lahan hutan di kawasan hutan bangklean memiliki ikatan yang sangat erat dengan ilmu geografi. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan pemerintah dalam hal :

- a. Mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan yang lestari.
- b. Diharapkan masyarakat lebih paham tentang pemanfaatan hutan yang lestari dan meminimalisir kerusakan lingkungan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi program perhutanan social.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

Definisi Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan disebutkan bahwa hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Menurut Society of American Forester (SAF) hutan sebagai ekosistem dicirikan oleh adanya penutupan pohon yang cukup rapat dan luas, biasanya dengan ciri-ciri beragam dalam komposisi jenis, struktur dan kelas umur yang membentuk suatu persekutuan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menurut Muntasib (1999), hutan memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Manfaat tersebut antara lain meliputi :

- Sebagai sumber kekayaan keanekaragaman hayati, plasma nutfah dan genetik
- Sebagai pelindung tanah dari erosi dan pengatur tata air
- Sebagai penyerap karbondioksida dan memproduksi oksigen
- Sebagai penghasil produk hasilhutan untuk keperluan masyarakat, industri dan ekspor
- Sebagai sumber mata pencarian dan tempat hidup sebagian masyarakat
- Sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelatihan
- Sebagai tempat rekreasi

Berdasarkan fungsi, hutan dibedakan menjadi:

1. Hutan lindung, diperuntukkan guna mengatur tata air, mencegah bencana dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
2. Hutan produksi, diperuntukkan guna hasil hutan.
3. Hutan suaka alam, baik karena memiliki sesuatu yang khas (cagar alam) ataupun suatu tempat hidup margasatwa tertentu (Suaka margasatwa).
4. Hutan wisata, memiliki keindahan (Taman Wisata) atau diperuntukkan untuk tempat berburu (Taman Buru).

Golongan hutan yang dipertahankan, meliputi: Hutan jati, yaitu tanah dan tempat yang mempunyai ciri-ciri: (1) seluruhnya atau sebagian besar ditumbuhi oleh pohon jati, dan (2) ditumbuhi pepohonan atau tidak, yang oleh pemerintah telah ditunjuk untuk perluasan hutan jati. Alasan untuk mempertahankan hutan (Salim, 2004):

1. Memenuhi akan kayu dan hasil-

hasil hutan lainnya. 2. Merupakan penata air. 3. Merupakan pengatur iklim. 4. Mempunyai nilai ekonomi. 5. Memenuhi pengetahuan umum lainnya.

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang di tunjuk dan di tetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati, serta jasa yang berasal dari hutan.

Dalam usaha pemanfaatan hutan pemerintah memberikan izin usaha yang disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemberian izin tersebut dapat diberikan kepada pihak BUMS, BUMN, BUMD, dan Koperasi. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), mempunyai hak seperti yang tercantum dalam izin yang diberikan yaitu untuk mengambil hasil hutan berupa kayu, dengan syarat-syarat tertentu seperti dengan tidak melakukan penebangan hutan di luar rencana kerja tahunan. Selain hak yang dimilikinya, setiap pemegang izin pemanfaatan hutan juga mempunyai kewajiban misalnya membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), melaksanakan penataan batas areal kerja, membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), membayar Dana Reboisasi (DR), dan sebagainya. Dengan segala hak dan kewajiban yang melekat terhadap izin pemanfaatan hutan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan tetap menjaga fungsi hutan yakni fungsi ekonomi (produksi), fungsi sosial, dan fungsi ekologi (lingkungan).

SISTEM AGROFORESTRI

Agroforestri merupakan suatu sistem penggarapan tanah atau penggunaan lahan di mana kegiatan kehutanan, pertanian, dan

peternakan dikombinasikan secara bersama-sama (Hairiah dkk., 2003). Agroforestri atau dikenal juga sebagai suatu sistem usahatani atau pertanian hutan merupakan suatu sistem penggunaan lahan secara spasial yang dilakukan oleh manusia dengan menerapkan berbagai teknologi yang ada melalui pemanfaatan tanaman semusim, tanaman tahunan (perdu, palem, bambu, dan sebagainya) dan/atau ternak dalam waktu bersamaan atau bergiliran pada suatu periode tertentu sehingga terbentuk interaksi ekologi, sosial, dan ekonomi di dalamnya (Hairiah dkk., 2003; Latumahina dan Sahureka, 2006). Menurut Santoso dkk. (2003), agroforestri memiliki beberapa ciri khas dibandingkan sistem penggunaan lahan lain, yaitu:

1. Adanya interaksi kuat antara komponen pepohonan dan bukan pepohonan.
2. Integrasi dua atau lebih jenis tanaman (salah satunya tanaman berkayu).
3. Memberikan dua atau lebih hasil dari penggunaan sistem agroforestri.
4. Siklusnya lebih dari satu tahun.
5. Dapat digunakan pada lahan berlereng curam, berbatu, berawa, ataupun tanah marginal di mana sistem penggunaan lahan lain kurang cocok.

Sistem agroforestri yang dapat digunakan pada lahan berlereng curam menjadi suatu nilai lebih dibandingkan sistem penggunaan lahan lain sehingga sistem ini dinilai dapat terus berkembang. Sistem agroforestri merupakan suatu teknik pemanfaatan lahan yang berkembang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi baru (Hairiah dkk., 2003).

Pemanfaatan agroforestri sebagai penghasil bahan pangan keberhasilan sistem agroforestri yang berlandaskan dari sistem pertanian kehutanan dapat dilihat dari adanya keuntungan yang dapat dihitung langsung melalui peningkatan produksi bahan pangan (Suhardi dkk.,

2005) dan ketahanan pangan (Ardhana dan Susanti, 2013; Pujiono dkk., 2013). Hal tersebut tentu dapat terwujud dengan pemilihan komoditas yang tepat. Jenis tanaman pada sistem agroforestri yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan antara lain padi gogo, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, dan sebagainya (Hairiah, 2003). Pemanfaatan agroforestri sebagai penghasil obat herbal tidak dipungkiri lagi Indonesia dikenal sebagai penghasil berbagai jenis obat herbal. Obat herbal tersebut berasal dari tanaman obat yang sebagian besar ditanam melalui sistem agroforestri. Pada sistem agroforestri pola tumpang sari dapat dilakukan pada tanaman obat berupa pohon seperti mahoni yang ditanam dengan tanaman jagung, singkong, dan padi (Ekasari, 2003; dalam Suharti dkk., 2013), tanaman obat berupa tanaman sela seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, dan laos yang ditanam pada hutan jati (Subagyo dkk., 2003; dalam Suharti dkk., 2013), serta tanaman obat berupa perdu seperti lempuyang, temu ireng, serai wangi, kunir putih, kunyit, mengkudu, dan temulawak yang ditanam dengan tanaman hutan yang berfungsi sebagai tanaman obat seperti pulai dan suren (Suharti dkk., 2013). Dengan berbagai jenis tanaman obat yang mampu dihasilkan melalui sistem agroforestri, masyarakat Indonesia tentu tidak perlu khawatir kekurangan bahan pembuatan obat herbal.

Kehutanan menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 adalah kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan pemanfaatannya, yakni suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menjamin dan memepertinggi pemanfaatan hutan secara lestari. Ada beberapa pengelolaan hutan yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu :

1. Social forestry

Merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dan lingkungan hidup dengan suatu tujuan sosial ekonomi tertentu (Kartasubrata, 1988), Haeruman (1985) dalam Kartasubrata (1988) menyamakan istilah social forestry dengan hutan kemasyarakatan,

yang diartikan sebagai interaksi antara hutan dengan masyarakat sekitarnya yang membentuk dan mengembangkan keduanya secara mantap dan berkesinambungan.

2. Agroforestry

Agroforestry adalah nama kolektif untuk sistem penggunaan lahan dan teknologi dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis palem, bambu dan sebagainya) ditanam bersamaan dengan tanaman pertanian dan atau hewan dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan spasial atau urutan temporal dan didalamnya terdapat interaksi ekologi dan ekonomi di antara berbagai komponen yang bersangkutan (Lundgren dan Rainteree, 1982 dalam Nair, 1993). Kartasubrata (1988) menjelaskan bahwa agroforestry adalah suatu sistem penggunaan lahan dengan suatu sistem penggunaan lahan dengan suatu tujuan produktivitas tertentu, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

3. Agroforest

Agroforest adalah ekosistem agroforestry serbaguna. Pepohonan ditanam secara rapat dalam suatu blok dengan memperhatikan derajat keanekaragaman jenis, seperti pepohonan, tanaman pertanian dan hewan dengan struktur tajuk yang multistrata dan di kelola oleh para petani. Repong damar dikenal sebagai bentuk agroforest yang merupakan salah satu bentuk teknologi agroforestry.

Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil

hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Upaya pengelolaan hutan yang meliputi pelebaran jarak tanam, agroforestry dan penghutan sosial perlu ditingkatkan yang pada prinsipnya langkah tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan pengusahaan hutan yang produksi utamanya adalah kayu. Dengan pengelolaan hutan yang terpadu dan melibatkan masyarakat sekitar hutan maka kekhawatiran akan keberadaan hutan dapat diatasi, di satu pihak Perum Perhutani memiliki sumber daya lahan dan di lain pihak masyarakat sekitar hutan merupakan 9 sumber daya manusia sekaligus konsumen perlu terjalin suatu mitra yang sejajar (Wardono,1991). Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan salah satu upaya pengelolaan hutan yang bisa dilaksanakan dengan pola hutan kemasyarakatan yaitu memberi kesempatan pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan ruang tumbuh berupa tanaman palawija yang ditanam dibawah tegakan pohon tanpa menuntut hak kepemilikan atas tanah dikawasan hutan. Pola kemasyarakatan bermaksud memberi kesempatan kepada masyarakat setempat yang tinggal didalam lahan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuannya. Sasaran dan tujuan dari hutan kemasyarakatan antara lain memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mereka mempunyai pola pemikiran hak dan kewajiban serta memiliki keinginan dalam melestarikan sumber daya hutan. Sedangkan tujuan dari hutan kemasyarakatan adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat didalam dan sekitar hutan (Departemen Kehutanan,1996).

Desa hutan menurut Surat Keputusan Dewan Pengawasan Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 adalah wilayah desaa yang secara geografis dan administrative berbatasan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Sedangkan Desa Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat adalah desa hutan yang minimal telah melaksanakan salah satu tahapan di lapangan meliputi implementasi PHBM. Masyarakat desa hutan merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Menurut PP No.6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolaha hutan, serta pemanfaatan hutan bab 1 pasal 1 ayat 1 “Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”.

Menurut Surat Keputusan Dewan Pengawasan Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2011 hutan pengakuan desa adalah kawasan hutan negara yang berada dalam wilayah administrative desa tertentu dan menjadi wilayah kerjasama antara Perhutani dam LMDH setempat dalam kerangka system PHBM. Menurut surat keputusan dewan pengawas Perum Perhutani No. 136/LPTS/DIR/2011 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu system pengolahan sumber daya hutan yang dilakukan Bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi sehingga kepentingan Bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang diwujudkan secara optimal dan proposional.

Hak dan Kewajiban Masing - Masing Pihak dalam PHBM

Hak dan kewajiban masing – masing pihak diatur sebagai berikut :

1. Masyarakat desa hutan berhak

- a) Bersama Perum Perhutani menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi.
- b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi factor produksi yang dikontribusikannya.
- c) Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2. Masyarakat desa hutan berkewajiban :

- a) Bersama Perum Perhutani menjaga dan melindungi sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
- b) Memberikan kontribusi factor produksi sesuai dengan kemampuannya.
- c) Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh Perum Perhutani dan Pihak yang berkepentingan.

3. Perum Perhutani berhak

- a) Bersama masyarakat desa hutan menyusun rencana kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi.
- b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi factor produksi yang dikontribusikannya.
- c) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

4. Perum Perhutani berkewajiban

- a) Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana monitoring dan evaluasi.
- b) Memberikan kontribusi factor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani.
- c) Mempersiapkan system, struktur dan budaya Perum Perhutani yang kondusif.

- d) Berkerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya kegiatan (Direktur Produksi Perum Perhutani, 2007).

Pembagian peran, tanggung jawab dan hasil kegiatan ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan keuntungan-keuntungan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian. Berbagi peran dan tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam kerja sama PHBM diatur dalam hak dan kewajiban Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan

1. Berbagi hasil kegiatan
2. Hasil hutan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas (jati dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati) dari kawasan hutan produksi yang di kelola secara PHBM. Kayu perkakas dan kayu bakar tersebut adalah kayu yang berasal dari tebangan yang direncanakan meliputi tebang akhir, tebang penjarangan, dan tebang *force majeure* (tebangan tak sangka dan tebangan dan tebangan hutan yang dihapuskan).
3. Hasil hutan bukan kayu yang menjadi obyek berbagi adalah hasil pertanian dan hasil tanaman palowijo yang di kelola secara PHMB.
4. Hasil kegiatan produktif pembagian hasil usaha produktif dapat berupa barang atau uang berdasarkan hasil kesepakatan berbagai pihak yang melakukan kerjasama.

Manfaat Program PHBM

Manfaat program PHBM adalah

- Manfaat ekologi Pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah akan bermanfaat bagi keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan itu sendiri.
- Manfaat ekonomi Melalui pemanfaatan berbagi yang jelas akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

- Manfaat sosial Memberikan manfaat sosial khususnya dalam menciptakan lapangan kerja serta peningkatan teknologi bagi masyarakat.

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang dilakukan seseorang sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi penulisan penelitian ini :

Kristiyar Sri Gunawan (2018) yang berjudul “Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gading, Kecamatan Tugu , Kabupaten Trenggalek dalam hal perizinanya menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan konsep *ihyah’ al mawaat*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama dilihat dari kelembagaan yang terkait yaitu perhutani bahwa izin pemanfaatan hutan milik negara yang di kelola masyarakat desa Gading tidak diketahui ijin yang sah karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Kedua menurut konsep *ihya al mawaat* diperoleh dengan syarat tidak membuat mudarat bagi keberlangsungan lingkungan sekitar.

Siti Zulaifah (2006) yang berjudul Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat untuk pengembangan kawasan Hutan Renggaloh. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan keruangan dan pendekatan substansial. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Data dikumpulkan dengan

kuesioner dan wawancara lisan kepada para petani, ketua LMDH, petugas lapangan dari pihak perhutani. Data dianalisis secara kuantitatif dan diskriptif, sedangkan perumusan strategi menggunakan analisis SWOT. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Kawasan Hutan Rengaloh yang umumnya berada pada usia produktif masih miskin. Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan sumberdaya hutan, menunjukkan bahwa diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya hutan non tegakan (non kayu) meliputi usaha tanaman tumpangsari dan camping ground yang ada di Hutan Regaloh mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan, baik dari sektor industri, sektor pertanian sub sektor kehutanan maupun sektor pariwisata. Pada sektor pertanian sub sektor kehutanan, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan non tegakan hutan (non kayu atau non timber) hampir seimbang dengan kontribusi pendapatan dari tegakan hutan terhadap pendapatan kawasan Hutan Regaloh

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang diteliti adalah pemanfaatan sumber daya hutan bersama masyarakat untuk pengembangan kawasan hutan.

Tabel 1.3 Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Kristiyar Sri Gunawan (2018)	Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam (Studi Di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)	Mengkaji pelaksanaan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gading, Kecamatan Tugu , Kabupaten Trenggalek dalam hal perizinanya menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan konsep ihyah' al mawaat.	Metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitataif.	Izin pemanfaatan hutan milik negara yang di kelola masyarakat desa Gading tidak diketahui ijin yang sah karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Dan menurut konsep ihyah al mawaat diperoleh dengan syarat tidak membuat mudarat bagi keberlangsungan lingkungan sekitar
2.	Siti Zulaifah 2006	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh	merumuskan strategi pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat untuk pengembangan kawasan Hutan	Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan keruangan dan pendekatan substansial. Penelitian	Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kawasan Hutan Rengaloh yang umumnya berada pada usia produktif masih miskin. Berdasarkan

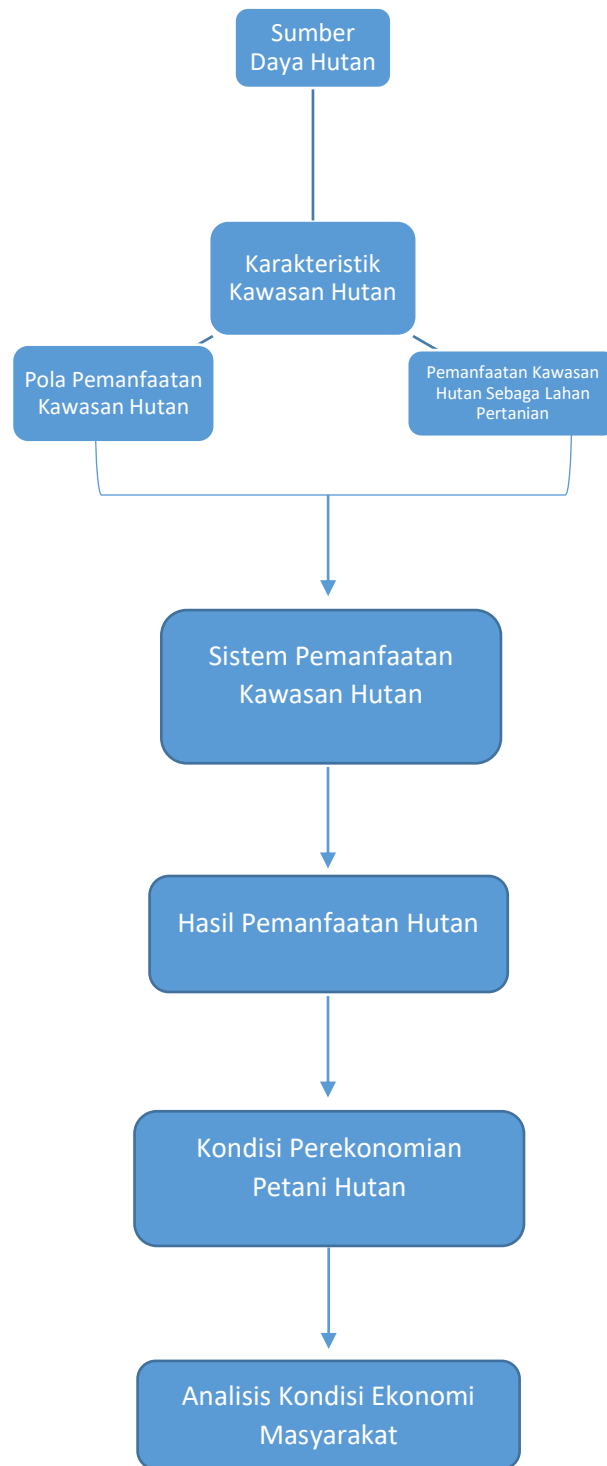
		Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	Renggaloh.	dilakukan dengan metode survei.	hasil analisis pemanfaatan sumberdaya hutan, menunjukkan bahwa diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya hutan non tegakan (non kayu) meliputi usaha tanaman tumpangsari
3.	Laila Agustina 2020	Analisis Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Agroforestry) Di Kawasan Hutan Bangklean, Kecamatan Jati Kabupaten Blora	Mengetahui pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat di kawasan hutan bangklean dan mengetahui dampak ekonomi bagi masyarakat yang bersangkutan	Metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Teknik pengambilan sampel <i>proportional randem sampling</i>	

Sumber : Penulis, 2020

1.6. Kerangka Penelitian

Pengelolaan Kawasan Hutan Bangklan sebagai hutan produksi (kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu, berdasarkan UURI No. 41 Bab I pasal 1 tentang Kehutanan) oleh Perum Perhutani dilaksanakan dengan penganekaragaman pemanfaatan sumberdaya hutan. Pemanfaatan Kawasan Hutan Bangklan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 34/2002 Pasal 25 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan hutan pada hutan produksi harus tetap menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan fungsi pokoknya. Pemanfaatan sumberdaya hutan yang selama ini telah berjalan di Kawasan Hutan Bangklean antara lain tumbuhan pokok hutan berupa pohon Jati (*Tectona grandis*) serta pemanfaatan tumpangsari oleh petani yang menggarap lahan hutan milik Perhutani. Penelitian ini difokuskan terutama pada pemanfaatan sumberdaya hutan berupa tumpangsari di kawasan hutan. Pemanfaatan sumberdaya hutan di kawasan Hutan Bangklean berdasarkan pengamatan sementara di lapangan diduga mempunyai prospek untuk ditingkatkan. Pengembangan kawasan Hutan Bangklean harus berdasar potensi sumberdaya hutan yang ada dengan didukung oleh sosial ekonomi masyarakat dan faktor penunjang pemanfaatan sumberdaya hutan. Artinya, pemanfaatan sumberdaya hutan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hutan.

Dalam penelitian ini meneliti pemanfaatan sumberdaya hutan yang potensial dan mengidentifikasi kondisi ekonomi masyarakat petani yang terkait aktivitas di hutan. Dalam mengidentifikasi pemanfaatan sumberdaya hutan cukup dibatasi lahan kawasan hutan, vegetasi kawasan hutan. Identifikasi pemanfaatan sumberdaya hutan yang potensial ini dilakukan untuk mengetahui hasil- hasil usaha pemanfaatan sumberdaya hutan yang potensial oleh masyarakat petani yang terkait dengan aktivitas hutan maupun pihak Perhutani. Sedangkan dalam mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat petani yang terkait aktivitas di hutan dilakukan untuk mengetahui peranan keberadaan hutan terhadap keadaan ekonomi masyarakat petani yang meliputi pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian
Sumber : Penulis, 2020

1.7. BATASAN OPERASIONAL

Agroforestry suatu sistem pengelolaan lahan yang berazaskan kelestarian untuk meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, melalui kombinasi produksi (termasuk tanaman pohon-pohonan) dan tanaman hutan dan atau hewan secara bersamaan atau beruntun pada unit lahan yang sama dan menerapkan cara-cara pengolahan yang sesuai dengan kebudayaan penduduk setempat (International Council for research in Agroforestry (ICRAF))

Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan (Perum Perhutani, 2009).

Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk mendukung kehidupannya (Perum Perhutani, 2009).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (UU 41/1999).

Kawasan hutan adalah istilah yang dikenal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu menurut pasal 3 yang berbunyi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Penghasilan atau penerimaan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal, meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Penghasilan meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal maupun yang berasal dari luar operasi normalnya, dalam satuan rupiah (Ikatan Akuntan Indonesia, 1996).

Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya (perhutanan sosial)

Petani hutan (pesanggem) adalah anggota kelompok tani hutan yang menggarap lahan hutan (Perum Perhutani, 2009).